



DEWAN PENGURUS PUSAT ALIANSI HONORER NON DATA BASE BKN GAGAL CPNS INDONESIA

Sekretariat : Jl. Cluster Brojo Anom, Jatirangon Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi
email : nonasngagalcpns@gmail.com No.whatsapp : 082126032662

Hasil Negosiasi Aksi Damai Senin, 08 September 2025

Perwakilan dari Kemen-PANRB :

1. Bpk. Tasdik Kinanto, S.H, M. Hum (Staff Ahli);
2. Bpk. Suryo Hidayat, S. H, M. Si (Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaaan SDM Aparatur);
3. Bpk. Abdul Hakim, S. Sos., M. Si (Staf ahli Bidang Budaya Kerja);
4. Bpk. Brigjen Pol. Toni Harmanto (Perwira tinggi POLRI);

Hasil Negosiasi :

1. Pihak KemenPAN-RB menyambut dengan baik perwakilan dari negosiator secara terbuka;
2. Negosiasi diawali dengan sambutan dari masing-masing perwakilan dari KemenPan-RB;
3. Dilanjutkan dengan masing-masing perwakilan dari negosiator memperkenalkan diri dan daerah asalnya;
4. Secara bergantian negosiator mengutarakan permasalahannya;
5. Pihak MenPan-RB mencatat segala kendala dan permasalahan yang diutarakan dari perwakilan masing-masing negosiator;
6. Inti dari tuntutan teman-teman yang menjadi negosiator massa aksi damai adalah dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, pernyataan tersebut ditekankan dan dicatat langsung oleh Pak Suryo (Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaaan SDM Aparatur);
7. Akan tetapi tanggapan dari pihak MenPan-RB adalah Perlu dipahami oleh teman-teman honorer bahwa dalam membuat regulasi tidaklah cukup dalam waktu 1 hari saja, karena pihak yang Kepala daerah agar mengajukan formasi untuk tenaga honorer yang masih tertinggal/belum diakomodir untuk kemudian dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh waktu serta perlu juga berkoordinasi kepada BKN agar secara teknis dapat mengatur dan membuka data teman-teman honorer di portal SIASN;
8. Adapun permohonan kami untuk kategori yang dapat diakomodir menjadi PPPK Paruh waktu kepada pihak MenPan-RB adalah tenaga honorer Non Data Base BKN yang mengabdi selama minimal 2 tahun secara terus menerus per Desember 2024 di Instansi Pemerintah dengan segala latar belakangnya;

9. Untuk perkembangan proses keluarnya regulasi lebih lanjut akan terus dikomunikasikan secara intens antara Pak Suryo (Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaaan SDM Aparatur) dan Ketua Aliansi;

Berdasarkan hasil negosiasi di atas, rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan di daerah masing-masing adalah :

1. Berkoordinasi dan menyampaikan hasil Negosiasi Aksi Damai kepada BKPSDM dan Kepala Daerah;
2. Memohon dukungan dari pemerintah daerah untuk secara masif memperhatikan masalah ini agar secepatnya mendapatkan solusi;
3. Sebelum pengajuan PPPK Kepada Pemerintah daerah, agar memastikan kembali data honorer non data base dengan masa kerja minimal 2 tahun secara terus menerus per Desember 2024 dengan sebenar-benarnya. Tentu hal tersebut perlu pengawalan dari teman-teman honorer dan kepala instansi/OPD terkait agar dapat benar-benar dipastikan bahwa tidak ada honorer siluman karena akan ada kaitannya dengan data di SIASN yang akan dibuka oleh BKN.

DPP Aliansi Honorer Non Data Base BKN Gagal CPNS Indonesia

Ketua



Muh. Badru S Al Ghiffari

Sekretaris



Lailatul Fitriyah